



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/ /KEP//2025

TENTANG
RENCANA KERJA **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah berperan penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2026 diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat pagu indikatif, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. bahwa terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 telah dilakukan verifikasi dan telah selaras dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2025 Nomor 22;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

NOMOR: 180.182/ /KEP/**KODE**

PD/2025

TENTANG

RENCANA KERJA **SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

RENCANA KERJA **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD mempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja-PD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra 2025-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD).
- 2) Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang mana ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kabupaten Magelang.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Magelang diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2026. Perumusan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026 mengakomodir program-program yang ada di PD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja PD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 yang selanjutnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6057)
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Magelang. (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14)
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

1.3.1 Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi

DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, perlu disampaikan Sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja yang diharapkan tahun ini

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijaksanaan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran di Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan
- 4.2 Pendanaan PD

BAB V: PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah meningkatnya pelaksanaan tugas tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025) sampai dengan triwulan dua sebagai berikut:

- Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang terdapat 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 52 (lima puluh) sub kegiatan
 - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 41.081.936.101,- terealisasi Rp. 40.061.395.923,- atau sebesar 97,52% dengan predikat sangat tinggi.
 - II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 32.252.498.692,- terealisasi Rp. 21.221.366.146,- atau 65,80% dengan predikat sedang.

Sedangkan Realisasi kegiatan/sub kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2024 adalah:

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan rencana anggaran Rp.3.915.730.000,- dan terealisasi Rp. 1.862.368.997,- atau 47,56%
2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan rencana anggaran Rp.1.802.605.435,- dan terealisasi sebesar Rp.1.413.800.985,- atau 51%
3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan rencana anggaran Rp. 19.457.419.066,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.203.929.618,- atau sebesar 62,7%

- Realisasi kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.937.430,- terealisasi sebesar Rp. 6.667.098,- atau 96%.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.774.635.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.561.696.696.348,- atau 95,36%
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp. 553.069.000,- teralisasi sebesar Rp. 486.264.066,- atau 87,92%
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran Rp. 202.324.000,- terealisasi Rp. 200.840.000,- atau 99%.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran Rp. 163.040.000,- terealisasi Rp. 141.330.498,- atau 86,68%
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran Rp. 1.244.105.950,- terealisasi sebesar Rp. 1.019.653.130,- atau sebesar Rp. 81,63%.
 7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.802.058.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.768.275.925,- atau sebesar 99%.
 8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dari rencana anggaran Rp. 1.851.416.466,- terealisasi Rp. 1.653.020.590,- atau 89%.
 9. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dari rencana anggaran Rp. 1.147.930.125,- terealisasi sebesar Rp. 1.028.669.429.000,- atau 89%
 10. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dari rencana anggaran Rp. 515.905.000,- terealisasi Rp. 494.948.385,- atau sebesar 95,4%

11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dari rencana anggaran Rp. 4.657.751.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.224.132.641,- atau 90,69%
 12. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dari rencana anggaran Rp. 544.982.850,- terealisasi sebesar Rp. 512.289.000,- atau 94%.
 13. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dari rencana anggaran Rp. 32.661.000,- terealisasi Rp. 31.358.520,- atau 96%
- Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan.
 1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurang cermatnya dalam perencanaan, sehingga tidak terealisasi sesuai dengan jadwal.
 - b. Kurang referensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala.
 2. Adanya Kegiatan Paripurna yang dilaksanakan dalam satu waktu dengan kata lain digabung;
 - Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
 1. Selalu berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi seraca intensif antar pengampu kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik
 2. Lebih proaktif mengadakan komunikasi dengan DPRD/Alat Kelengkapan yang ada dalam penjadwalan kegiatan sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan sasaran.
 3. Atasan langsung memantau/memonitor perkembangan kegiatan atau sub kegiatan serta pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya.

4. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang direncanakan.
5. Standar fungsi pengawasan yang baik untuk mengawasi SKPD sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang direncanakan;
6. SKPD dapat bekerjasama dengan baik dengan DPRD sehingga dalam proses penganggaran dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan kegiatan yang menjadi program kerja SKPD terkait;
7. Adanya kerja sama yang baik dalam proses pembuatan PERDA baik itu anggota DPRD khususnya Badan Pembentukan Perda dengan tim yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga Perda yang digarap dapat cepai selesai;
8. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu; sosialisasi yang intensif perlu diupayakan terutama untuk hal -hal/informasi terbaru atau peraturan - peraturan terbaru yang bersifat top down;
9. Pentingnya rekrutment pegawai berdasarkan tingkat kebutuhan instansi;
10. Dukungan dan bantuan semua pihak agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat terwujud dengan baik

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2024
Kabupaten Magelang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahann Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>					
	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : Persentase Fasilitasi Layanan Produk-produk Hukum Daerah Output: Jumlah Dokumen Renja dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	31	31	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang Tersusun	8 Dokumen 23 Laporan	8 23		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Output :		24	2,82	0
		Output :				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	34		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Output : Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	12 dokumen	12		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Outcome : Persentase Fasilitasi Layanan Produk-produk hukum daerah Output: Jumlah Kegiatan administrasi kepegawaian		30	107,14	0
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Output : Jumlah orang yang mengikuti bintek	15 orang	30		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Perundang-undangan	implementasi peraturan perundang-undangan				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat Output: Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	30	34	113,33	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen	1		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Output :	12 Dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dokumen	12		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan 16 laporan	16		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output : Jumlah Daftar arsip dinamis pada SKPD	1 Daftar	1		
		Jumlah paket pengadaan barang milik daerah	16	12	75,00	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
		penunjang urusan pemerintahan				
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya	12 unit	-		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Output: Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94% 24	24	100	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Output : Jumlah laporan Penyediaan jasa suratmenyurat	12 Laporan	12		
		Output :	12 laporan			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan		12		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome : Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Output: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		42	140,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	17 unit	17		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	13 dokumen	13		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Output : Jumlah Mebelair yang dipelihara	2 dokumen	2		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan & Msin lainnya yang dipelihara	12 dokumen	9		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	12 dokumen	12		
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Outcome :Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah Output: Terfasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	96			0,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Output : Jumlah anggota DPRD yang menerima hak	50 orang/bulan	200		
		Output :				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah seragam dan atribut yang disediakan	2 paket	2		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Output : Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	44	44		
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Outcome :Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Output: Jumlah Layanan Administrasi DPRD	32	28	87,50	0,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 laporan	8		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rakor DPRD	12 laporan	-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Output : Jumlah paket kebutuhan RT yang disediakan	12 paket	12		
	<u>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</u>					
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Outcome: Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda Output: Jumlah perda yang ditetapkan	31	- 39	125,81	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Output : Jumlah dokumen Hasil Penyusunan Propemperda	3 dokumen	8		
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Output : Jumlah Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21 dokumen	21		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen/kegiatan	6		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Naskah Akademik	4 dokumen	4		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /keterangan dan /atau Naskah Akademik Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Outcome: Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran Output: Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	48	39	81,25	0,00
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Output :	9 dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		10		
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output :	12 Dokumen			
		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA PPAS		12		
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Output :	9 dokumen	9		
		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD				
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Output : Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	11 Dokumen			
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Output :	7 dokumen			
		Jumlah dokumen hasil pertanggungjawaban APBD		7		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Outcome: Persentase Fasilitasi Layanan Produk-produk hukum Daerah Output: Output :	88	45	51,14	0,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Output : Jumlah dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	20 laporan	20		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Output : Jumlah dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur	20 laporan	20		
		Output :	20 laporan			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat		20		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Output : Jumlah dokumen hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang perekonomian	20 laporan	20		
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Output : Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 dokumen	3		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Output : Jumlah dokumen hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6 dokumen	6		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Outcome: Jumlah dokumen peningkatan kapasitas DPRD Output: Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD		-		
	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Output :	1 dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Output : Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	7		
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Output : Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	137 dokumen	137		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Output : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	0		
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Output : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7		
		Output :	1 dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		0		
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Output : Frekuensi Reses DPRD	8	7	87,50	0,00
	Sub Kegiatan Kunjungan Dalam Daerah	Output : Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	3 laporan	3		
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Output : Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD	2 dokumen	0		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Output: Frekuensi Reses DPRD	3 Kali	3		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Outcome: Persentase Fasilitasi Layanan Produk-produk daerah Output: Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Kode Etik	21 laporan 6 Kali	21	100,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD					
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Output: Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik	21 laporan	21	-	0,00
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Outcome: Persentase Fasilitasi Layanan Produk-produk				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
		daerah Output: Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	97	85	87,63	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Output Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 dokumen	13		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Output Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 dokumen	13		
		Output	64 dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		64		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi secara umum, antara lain:

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- e. Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan serta ketertiban kedalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Sedangkan untuk fungsi khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 7 tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD memiliki fungsi diantaranya :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang di Tampilkan dalam Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024 yang mengukur tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi dicapai sebesar 88,45%, dengan predikat *sangat baik*.

Namun dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
2. Ada Kegiatan Dewan yang tidak tertip pada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;

3. Keterbatasan SDM/Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata;
4. Kelemahan data kinerja;
5. Para PPTK yang kurang mampu dalam merencanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan;
6. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.

Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-3 (tiga) RPD Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025–2026, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang antara lain:

1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membatu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.
3. Menyediakan serta mengkoordinasikan secara maksimal tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah.
4. Diperlukan penempatan pegawai yang sesuai dengan jenis pendidikan dan keahliannya.
5. Adanya tuntutan kualitas SDM aparatur / ASN dalam meningkatkan daya saing global.

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai penyelenggara pemerintah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang.
4. Meningkatkan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.
5. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib keuangan.

6. Meningkatkan inventarisasi aset daerah melalui penguatan manajemen aset dan pemanfaatan aset daerah.
7. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah.

Isu – Isu penting tentang peningkatan SDM direkomendasikan dan menjadi catatan yang strategis untuk ditinjaulanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2026 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan / dari masyarakat Kabupaten Magelang untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Yang disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Magelang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Visi Misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2029 dilaksanakan periode kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Visi “ Bersama Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan ke dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan asta cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 8 (Delapan) agenda pembangunan tahun 2025-2029 yaitu

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bio ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif UMKM dan Koperasi, tenaga kerja serta BUMN), Penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi

ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar Kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yg dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesenambungan pembangunan untuk pengawal pencapaian Indonesia Emas diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam mendukung fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran DPRD dalam kaitan dengan kebijakan nasional. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah, sekaligus mendukung peran DPRD dalam mengawasi dan mengadvokasi kepentingan daerah tingkat nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasikan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program. Kegiatan dan sub kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjukkan suatu kondisi yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjukkan suatu yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijakan, program kegiatan dan subkegiatan. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bias dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahun. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengolahan dan pengumpulan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan kepada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat dan uang yang digunakan dalam proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahapan perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembagian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan wakil Presiden, ada kebijakan pemerintah, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan
5. Transportasi ekonomi.

Kelima kebijakan tersebut, akan menjadi dasar bagi alat kelengkapan dewan pada saat pembahasan-pembahasan kebijakan daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan-pembahasan sesuai tugas dan fungsi dewan, maka peran Sekretariat DPRD menjadi sangat penting.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi mengandung makna :

1. Merupakan hasil terakhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir rencana kerja;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana kerja.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja perangkat daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan misinya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan prosedur keuangan yang efektif dalam rangka menunjang kinerja DPRD.
2. Mengembangkan dan meningkatkan SDM yang profesional dalam upaya memperkuat dukungan analisa dan kajian dalam pengambilan kebijakan DPRD.

3. Mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD dalam menegakkan kaidah demokrasi.

Maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Membangun rasa kebersamaan di dalam kelembagaan.
4. Memberikan pelayanan administrasi secara maksimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Memfasilitasi dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi beberapa kriteria yaitu terukur (*measurable*), berorientasi hasil (*result oriented*). Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.

3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan.
4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada pencapaian Visi dan Bupati Magelang sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026
- b. Mengarah pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Tahun 2025-2026
- c. Mengarah pada pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Magelang.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada Tahun 2026 tertuang dalam tabel berikut ini.

**RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. MAGELANG
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						55.430.679.000,00							69.042.252.636,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						55.416.159.000,00							69.027.732.636,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						55.416.159.000,00							69.027.732.636,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	40.850.740.816,00						-	41.486.376.719,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.031.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	7.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	9.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		6.644.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			-				-	614.000,00	-	-	-	-	-		614.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.569.704.542,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	5.142.333.664,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				34 0	5.516.816.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		5.089.445.664,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		52.888.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	663.755.000,00			-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	806.289.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				17 Paket	25.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		25.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				96 Orang	638.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		780.589.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	321.691.700,00			-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	384.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				150 Paket	71.906.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		128.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	114.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta konduktivitas wilayah	-		125.208.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	128.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta konduktivitas wilayah	-		123.552.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	6.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta konduktivitas wilayah	-		7.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.776.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	30.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	27.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.422.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	178.422.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	16.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		16.422.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	174.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		162.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.334.140.074,00			-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	1.414.972.674,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				17 Unit	319.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		319.939.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	353.728.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		353.728.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	3.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		9.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				31 Unit	20.523.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		32.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	636.840.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		699.065.174,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	31.819.455.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	32.005.808.381,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				50 Orang/Bulan	31.537.455.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		31.537.455.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				2 Paket	228.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		383.372.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				50 Orang	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		84.981.381,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	883.765.500,00			-	4. Pengu- an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	1.487.283.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				10 Laporan	44.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		36.989.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				9 Laporan	659.423.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		1.270.294.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				12 Paket	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	14.565.418.184,00						-	27.541.355.917,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	2.101.646.727,00			-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	3.086.402.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				3 Dokumen	423.974.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		503.889.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				6 Dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		1.229.452.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				4 Dokumen	394.438.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		980.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	83.234.241,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		372.436.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	1.662.312.932,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	2.744.896.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	414.089.771,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		863.881.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				1 Dokumen	435.747.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		877.478.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	207.363.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		200.511.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>				1 Dokumen	200.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		200.511.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	404.601.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		602.515.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	1.289.466.599,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	1.734.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				2 Laporan	171.603.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		277.251.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				2 Laporan	171.386.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		283.477.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				2 Laporan	171.001.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		285.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				2 Laporan	170.759.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		283.487.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	198.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		198.608.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	406.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		406.108.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	2.988.401.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	3.329.016.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				6 Dokumen	2.318.042.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		2.327.114.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				18 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				7 Orang	165.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		165.939.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				1 Dokumen	4.732.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		336.275.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				13 Dokumen	479.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		479.688.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	643.457.000,00			-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	632.432.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				1 Laporan	13.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		13.396.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				2 Dokumen	6.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		6.354.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	623.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Pengu- an tata kelola pem- erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		612.682.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	6.532.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	6.532.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				8 Laporan	6.532.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		6.532.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	5.873.601.026,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	16.007.721.817,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				20 Dokumen	4.053.550.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		13.259.278.817,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				6 Dokumen	404.435.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		404.436.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				15 Dokumen	1.415.615.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		2.344.007.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	NON URUSAN														
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.520.000,00						-	14.520.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	14.520.000,00			-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-	-	14.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	14.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Pengu an tata kelola pem erintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah	-		14.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H								55.430.679.000,00							69.042.252.636,00	

BAB V

PENUTUP

1.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra DPRD Kabupaten Magelang yang terkait sebagai unsur penunjang langsung jalannya pemerintahan dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Sekretariat DPRD prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Magelang Tahun 2026. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci ke dalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD lebih pada aspek administrasi dan teknis. Secara administrasi, permasalahan yang muncul adalah lemahnya sistem administrasi dengan belum sempurnanya penerapan standar operasional prosedur. Sedangkan secara teknis, minimnya SDM yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa menjadi kendala yang cukup serius. Namun dapat diatasi dengan adanya LPSE dan ULP. Ke depan, diharapkan kelemahan-kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri. Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam

Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 –2026. Program defektufan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, baik dalam rangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperlihatkan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang ditingkat Kabupaten.

1.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Di dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja PD sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renja-PD Tahun 2026 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya RKP, RPJMN, RPJMD Propinsi, RPJP Kabupaten Magelang, RPJMD Kabupaten Magelang, RPD Kabupaten Magelang dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2026.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

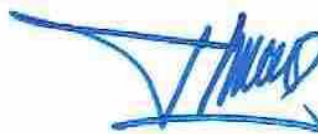
- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa seimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward ang punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang di atas, dengan

tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Magelang serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Kota Mungkid, Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG



Dra. ARI HANDOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 200302 1 009

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI